

Landasan Konseptual Sistem Komunikasi Indonesia

Drs. Widodo A.S., M.Si.



PENDAHULUAN

Sistem merupakan satu kata kunci dalam memahami keterkaitan berbagai gejala kehidupan, baik yang terkait dengan gejala-gejala alamiah maupun gejala-gejala yang terkait dengan gerak manusia dalam kehidupannya. Tidak ada satu pun gejala kehidupan yang tidak memiliki mekanisme dalam gerakannya, artinya tidak ada gejala kehidupan yang tidak dibangun atas dasar mekanisme yang membentuk sebuah sistem. Sistem membangun sebuah pola keberaturan dalam sebuah dinamika gerak dalam konfigurasi yang mekanis. Sistem tata surya, sistem peredaran darah, sistem syaraf merupakan contoh-contoh yang paling mudah terkait dengan gejala alam dan gejala fisiologis manusia. Gejala alamiah lebih mudah untuk dipahami karena gejala-gejalanya menyangkut hukum-hukum tertentu yang sudah pasti. Namun, yang terkait dengan gejala gerak manusia dalam kehidupannya sangatlah sulit. Hal ini karena menyangkut sebuah entitas kehidupan yang tidak tunggal dan multidimensional.

Manusia merupakan makhluk multidimensional dan memiliki banyak sisi kehidupan. Selain sisi kehidupan pribadi, manusia juga memiliki sisi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oleh karena manusia hidup dalam lingkup suatu komunitas maka ada satu mekanisme yang mengatur hubungan antara manusia dalam komunitas itu. Mekanisme itu terus berjalan membentuk suatu pola keteraturan dalam hubungan. Mekanisme dalam pola hubungan ini akhirnya melembaga dalam sebuah struktur kemasyarakatan menjadi suatu sistem yang mengatur hubungan kemasyarakatan. Maka kemudian lahirlah sistem sosial dengan kelembagaan sosialnya, sistem politik dengan kelembagaan politiknya, sistem ekonomi dengan kelembagaan ekonominya, dan tentu saja sistem komunikasi dengan kelembagaan komunikasinya. Berbeda dengan sistem yang terdapat pada fenomena alam dengan teori dan hukum yang relatif tetap/pasti maka dalam

sistem kemasyarakatan teori-teorinya dimungkinkan untuk berbeda, sesuai dengan sifat, dinamika, dan perspektif dalam memahami gejala kemasyarakatan yang ada.

Pada modul ini akan diuraikan hal-hal mendasar tentang konsep sistem komunikasi Indonesia yang berangkat dari pengertian sistem dengan ruang lingkupnya, sistem sosial dan sistem politik Indonesia yang menjadi landasan konseptual dan operasional sistem komunikasi Indonesia, serta hakikat dari konsep sistem komunikasi Indonesia itu sendiri. Pada dasarnya, sistem komunikasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar dari sistem kemasyarakatan baik dari aspek sosial, budaya, dan politik dalam kesatuan sistem nasional.

Secara umum, setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang konsep sistem komunikasi Indonesia, dan secara khusus dapat menjelaskan tentang:

1. pengertian sistem dengan ruang lingkupnya;
2. sistem sosial dan sistem politik Indonesia yang menjadi landasan konseptual dan operasional sistem komunikasi Indonesia;
3. hakikat dari konsep sistem komunikasi Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Memahami Sistem dan Sistem Sosial

Kata sistem meski pada awalnya merupakan istilah yang spesifik dalam ilmu-ilmu eksakta, namun pada perkembangannya telah menjadi bagian dari keseluruhan disiplin ilmu. Kita tidak bisa lagi membatasi pengertian sistem hanya untuk menjelaskan ilmu alam, biologi, atau teknik. Hampir semua atau bahkan keseluruhan ilmu sosial dan ilmu humaniora mengadopsi istilah sistem ini dalam bidang keilmuannya. Bahkan pendekatan sistem atau teori sistem banyak digunakan dan dikembangkan khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Begitu populernya kata sistem ini sehingga menjadi sebuah istilah generik dalam ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, dalam memberikan bahasan pada kegiatan pembelajaran ini yang mencakup sistem sosial, sistem politik, dan sistem komunikasi maka terlebih dahulu akan diuraikan berbagai hal yang menyangkut tentang sistem.

A. PENGERTIAN SISTEM

Banyak pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tentang sistem. Namun, pada umumnya sistem merujuk pada sekumpulan elemen yang bekerja bersama dalam suatu mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arthur D. Hall (1962: 60) mendefinisikan sistem sebagai: *‘...a set of objects with relationships between the objects and their attributes.* Definisi dari Arthur D. Hall ini tentu saja masih sangat elementer, hanya menyangkut elemen-elemen (kumpulan objek) dari sistem yang saling berhubungan dengan atribut-atributnya.

Rechtin memberikan definisi sistem dengan lebih jelas, mencakup objek dan juga tujuannya. Rechtin mendefinisikan sistem sebagai: *‘...as a collection of things working together to produce something greater.... A system has the further property that it is unbounded – each system is inherently a part of a still larger system* (Rechtin, 1991: 1). Dari definisi Rechtin ini tampak jelas bahwa sistem bukan hanya sebagai sekumpulan objek yang berkaitan tanpa adanya suatu tujuan tertentu. Rechtin menegaskan bahwa sekumpulan objek tersebut bekerja secara bersama untuk

menghasilkan sesuatu yang lebih besar, yakni sesuatu yang menjadi tujuan bersama dalam sistem. Selain itu, bahwa suatu sistem memiliki keberlanjutan karena ia secara inheren adalah bagian dari sistem yang lebih besar lagi. Rechten lebih lanjut mengatakan:

1. *A system is a complex set of dissimilar elements or parts so connected or related as to form an organic whole.*
2. *The whole is greater in some sense than the sum of the parts, that is, the system has properties beyond those of the parts. Indeed, the purpose of building systems is to gain those properties. (1991: 28).*

Jelaslah dari definisi sistem yang dikemukakan oleh Rechten menegaskan adanya ciri-ciri tertentu dalam sistem. Sistem merupakan seperangkat unsur yang kompleks dari elemen-elemen yang berbeda atau bagian-bagian yang terhubung atau bagian-bagian yang terkait untuk membentuk suatu keseimbangan yang menyeluruh. Makna menyeluruh adalah mencakup semua bagian-bagian yang ada dalam sistem, bagian-bagian dengan keseluruhan sifat-sifatnya. Tujuan membangun sistem adalah mendapatkan sifat-sifat itu.

Pada kesempatan lain, Rechten dan rekannya Maier (1977: 21) menambahkan:” *a system is a collection of different things with together produce result unachievable by themselves alone. The value added by systems is in the relationships of their elements.* Di sini sistem merupakan kumpulan dari hal-hal yang berbeda yang secara bersama menghasilkan suatu hasil yang mungkin tidak akan dicapai apabila hal itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Nilai tambah yang diberikan oleh sistem dalam hal ini adalah dalam pertaliannya dengan elemen-elemen yang ada dalam sistem.

Untuk lebih memperjelas apa yang dikemukakan Rechten mengenai sistem, mungkin dapat ditambahkan sedikit cuplikan dari Astakhov (1998: 15) sebagai berikut: “*A system is something which accomplishes an operational process, that is, something is operated in some way to produce something. That which is operated upon is usually called input, that which is produced is called output, and the operating entity is called a system*”. Astakhov menekankan sistem dalam kaitannya dengan penyelesaian sebuah proses operasional yang dioperasikan dalam beberapa cara untuk menghasilkan sesuatu. Untuk hal yang dioperasikan, Astakhov menyebutnya sebagai masukan (*input*), sedangkan apa yang dihasilkan dari proses operasional itu disebutnya sebagai keluaran (*output*). Sementara entitas atau

kesatuan kerja yang mengoperasikan disebutnya sebagai sistem. Apa yang dikemukakan oleh Astakhov dapat dikatakan semakna dengan apa yang dikemukakan oleh Adamsen (2000: 6) yang mengemukakan sistem sebagai: *"Any entity within prescribed boundaries that performs work on an input in order to generate an output"*. Setiap kesatuan dalam batas-batas tertentu yang bekerja dengan suatu masukan tertentu untuk menghasilkan sebuah keluaran tertentu.

Dengan demikian, sebuah sistem adalah konfigurasi dari elemen atau komponen yang membentuk sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam satu kesatuan. Elemen atau komponen dalam sistem memiliki sifat-sifatnya sendiri yang membentuknya dalam sebuah subsistem. Sifat dalam subsistem adalah sifat dari sistem itu sendiri dalam menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem memiliki sifat-sifatnya, secara lebih rinci Talcot Parson merumuskan sifat-sifat sistem sebagai berikut:

1. sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling bergantung;
2. sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan;
3. sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur;
4. sifat dasar bagian dari suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain;
5. sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya;
6. alokasi dari integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem;
7. sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam. (Ritzer, 2008: 123).

Dari beberapa definisi atau pengertian sebagaimana telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa:

1. sistem merupakan kumpulan elemen dengan sifat atau atributnya masing-masing yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu,

- yang mana sesuatu itu tidak akan dapat dicapai apabila elemen-elemen itu tidak tergabung dalam kerja sama sistem;
2. sistem merupakan proses operasional yang melibatkan elemen-elemen dalam sistem melalui pemrosesan serangkaian masukan untuk menghasilkan suatu keluaran yang diharapkan;
 3. sistem merupakan sebuah entitas atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang membentuk sistem, dan sebuah sistem adalah menjadi bagian dari sistem yang lebih luas lagi;
 4. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya dan cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri.

B. SISTEM SOSIAL

Tidak mudah untuk menjelaskan sistem sosial Indonesia mengingat begitu beragamnya corak kehidupan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia yang merupakan entitas-entitas suku bangsa yang masing-masing memiliki sistem sosialnya sendiri. Untuk menjadikan satu sistem sosial yang berlaku di suatu entitas tertentu dari masyarakat Indonesia sebagai sistem sosial Indonesia tentunya merupakan bentuk pemerkosaan terhadap eksistensi sistem sosial dari entitas suku bangsa lainnya di Indonesia. Oleh karenanya, konsep sistem sosial Indonesia hanyalah sebuah rumusan politis yang dalam realita sosiologisnya sulit bagi kita untuk menyatakan berbagai sistem sosial yang ada di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan lebih mendekati realita sosiologis kalau dikatakan sebagai sistem sosial di Indonesia yang merefleksikan berbagai sistem sosial yang ada pada entitas-entitas suku bangsa yang ada di Indonesia.

Sistem sosial Indonesia mendasarkan pada kenyataan sosial yang hidup di antara entitas-entitas masyarakat yang dikonsepsikan sebagai suatu sistem kehidupan yang terbuka dan penuh interaksi baik internal maupun eksternal. Interaksi internal mencakup interaksi antarkomponen yang ada dalam sistem, sedang interaksi eksternal mencakup interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Sebuah sistem sosial adalah merupakan keniscayaan sebagai konsekuensi dari adanya kehidupan bersama. Meski Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan sistem sosialnya masing-masing, namun tidak berarti bahwa sistem sosial di Indonesia tidak dapat dijelaskan secara teoritik.

Sebagaimana sudah dikemukakan tentang sistem, sistem merupakan konstruksi abstrak dari sebuah mekanisme keteraturan hubungan antara elemen-elemen dalam sistem yang berinteraksi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Sistem adalah rangkaian yang terdiri dari subsistem-subsistem yang membentuk satu bangunan yang saling terkait satu sama lainnya. Demikian pula halnya dengan sistem sosial. Sistem sosial merupakan bangunan sistem yang mengatur hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Definisi atau pengertian dari sistem sosial dapat berbeda di antara para ahli yang mengemukakan. Perbedaannya lebih pada cara pandang dalam memberikan definisi atau pengertian dari sistem sosial.

Malina mendefinisikan sistem sosial sebagai: " ... a group of person whose interaction is structured and oriented around common concerns of purposes" (Malina, 2001: 21). Malina melihat sistem sosial sebagai interaksi terstruktur dari sekelompok orang yang diorientasikan untuk mengatasi masalah bersama atau mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Malina menambahkan: "Social system is a system of symbols that acts to establish powerfull, pervasive, and long - lasting moods and motivations in people, formulating conceptions of value objects, and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations are perceived to be uniquely realistic (Malina, 2001: 22). Di sini Malina melihat bahwa sistem sosial merupakan suatu sistem simbol yang digunakan untuk membangun suasana hati dan motivasi yang langgeng pada orang, merumuskan konsep-konsep tentang objek-objek yang bernilai, dan mengungkapkan konsep-konsep ini dalam aura yang sesungguhnya yang mana suasana hati dan motivasi dirasakan menjadi kenyataan yang khas.

Simbol-simbol di sini mencakup makna-makna dan nilai-nilai, serta perasaan tentang makna-makna dan nilai-nilai yang dilekatkan dan diwujudkan dalam diri seseorang dan oleh seseorang, hal sesuatu, dan juga peristiwa-peristiwa. Jadi sistem sosial adalah sistem simbol yang terdiri dari orang (diri sendiri dan orang lain), hal sesuatu (alam, waktu, dan ruang), dan peristiwa-peristiwa (kegiatan orang dan hal sesuatu) yang merupakan realitas yang menjadi kesepakatan bersama tentang suatu budaya.

Kalau Malina melihat sistem sosial sebagai sistem simbol yang menyangkut orang, hal sesuatu, dan peristiwa yang berinteraksi dalam satu kesepakatan budaya maka Talcot Parson menekankan sistem sosial pada interaksi dari aktor pelakunya. Parson menjelaskan: "Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang

sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan (fisik), aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi mereka yang didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural” (Ritzer, 2008: 17).

Hal yang hampir sama dengan pengertian ini adalah yang dikemukakan oleh Jens Becket. Jens Beckert mendefinisikan sistem sosial sebagai: ”Social system consists of the interaction of at least two, but usually many actors and are distinguished both from cultural systems and personality systems (2002: 156). Becket juga melihat bahwa sistem sosial merupakan interaksi yang terdiri setidaknya dua orang, tapi pada umumnya melibatkan banyak orang yang berbeda baik dari segi sistem budaya maupun sistem kepribadiannya.

Lebih lanjut Becket mengatakan: ”The more precise definition of social systems postulates a functionalist scheme, which states that processes in a system must fulfill four functional imperatives in order to form a stable equilibrium. The functional requirements are represented in the AGIL Scheme (Beckert, 2002: 156). Definisi yang lebih tepat mengenai sistem sosial menurut Becket adalah berdasarkan pada skema postulat yang dikembangkan oleh para fungsionalis. Para fungsionalis menyatakan bahwa proses dalam suatu sistem harus memenuhi empat fungsi yang tidak boleh tidak harus ada untuk membentuk keseimbangan yang stabil. Persyaratan fungsional ini direpresentasikan dalam skema AGIL.

Becket tampaknya mengadopsi pemikiran Talcot Parson mengenai sistem tindakan. Menurut Parson fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL.

1. *Adaptation* (adaptasi).

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan).

Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya.

3. *Integration* (integrasi).
Sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. *Latency* (pemeliharaan pola).
Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer, 2008: 121).

Agar dapat tetap bertahan maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini. Parson mendisain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teorinya, yang aplikasinya sebagai berikut.

1. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal.
2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
4. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, 2008: 122).

Tabel 1.1
Struktur Sistem Tindakan Umum

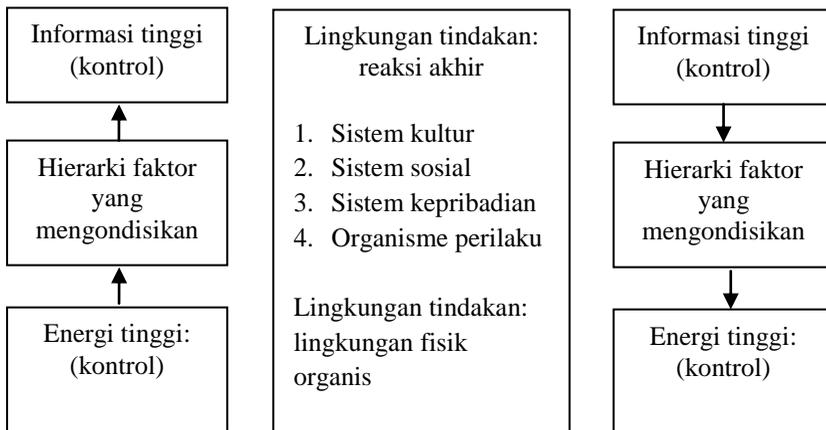
SISTEM KULTURAL (Fungsi pemeliharaan pola)	SISTEM SOSIAL (Fungsi integrasi)
ORGANISME PERILAKU (Fungsi adaptasi)	SISTEM KEPRIBADIAN (Fungsi pencapaian tujuan)

Dari skema tindakan Parson ini nampak bahwa Parson mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkatan analisis sosial maupun mengenai

hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hierarkinya jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parson terjadi dalam dua cara:

1. masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi;
2. tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.

Inti pemikiran Parson ditemukan dalam empat sistem tindakan yang diciptakannya. Tingkatan yang paling rendah dalam sistem tindakan ini adalah lingkungan fisik organis, meliputi aspek-aspek tubuh manusia, anatomi, dan fisiologisnya. Sedang tingkat yang paling tinggi dalam sistem tindakan adalah realitas terakhir yang berbau metafisik. Meski sesungguhnya Parson tidak pernah menyinggungnya hal-hal yang bersifat supranatural ketika membahas secara simbolik tentang kebimbangan, ketidakpastian, kegelisahan, dan tragedi kehidupan sosial yang menantang makna organisasi sosial (Ritzer, 2008: 123). Di antara dua lingkungan tindakan itulah terdapat empat sistem yang diciptakan oleh Parson meliputi organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural.



Gambar 1.1
Bagan Inti Pemikiran Parson

Terkait dengan sistem sosial, Parson mengatakan bahwa sistem sosial berawal pada interaksi tingkat mikro antara seseorang (*ego*) dengan orang lainnya (*alter ego*). Ini merupakan bentuk sistem sosial yang paling

mendasar. Pada definisi yang dikemukakan tentang sistem sosial, Parson menekankan interaksi pada sejumlah aktor dengan motivasi tertentu dalam lingkungan sosial dan budaya. Meski dalam definisinya Parson menekankan pada interaksi, akan tetapi Parson tidak menggunakan interaksi sebagai basis atau unit dasar dalam analisisnya tentang sistem sosial. Konsep yang digunakan oleh Parson justru pada status dan peran. Status dan peran ini bukan merujuk pada status dan peran sang aktor yang berinteraksi, akan tetapi komponen struktural dari sistem sosial. Menurut Parson, status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas.

Dalam sistem sosial ini, Parson menekankan pentingnya aktor. Akan tetapi, Parson lebih melihatnya sebagai kenyataan fungsional bukan struktural karena aktor merupakan pengemban dari fungsi peran yang adalah bagian dari sistem. Oleh karenanya, harus terdapat integrasi pola nilai dalam sistem antara aktor dengan struktur sosialnya. Ini hanya dapat dilakukan dengan melalui proses internalisasi dan sosialisasi. Di sini terdapat pengalihan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan, artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingannya, aktor harus mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan.

Dalam proses sosialisasi bukan hanya mengajarkan seorang untuk bertindak, akan tetapi juga mempelajari norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi merupakan sebuah proses yang konservatif, dalam hal ini disposisi kebutuhan yang sebagian besarnya dibentuk masyarakat mengikatkan anak-anak pada sistem sosial, dan sosialisasi itu menyediakan alat untuk memuaskan disposisi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, dalam proses sosialisasi ini hampir tidak ada kreativitas, kebutuhan untuk mendapatkan gratifikasi mengikatkan aktor pada sistem sebagaimana adanya. Sosialisasi merupakan pengalaman seumur hidup, norma, dan nilai yang ditanamkan cenderung bersifat umum sehingga tidak dapat digunakan oleh aktor ketika menghadapi berbagai situasi khusus ketika mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, dalam sosialisasi perlu dilengkapi serangkaian pengalaman sosialisasi yang bersifat spesifik, karena nilai dan norma yang dipelajari ketika masih kanak-kanak cenderung tidak berubah, dan dengan sedikit penguatan cenderung tetap berlaku seumur hidup.

Meski terdapat sosialisasi, namun akan tetap terdapat sejumlah besar perbedaan individual di dalam sistem. Namun, sejumlah perbedaan individual ini tidak menjadi problem besar bagi sistem sosial, padahal sistem sosial memerlukan keteraturan. Berikut ini, beberapa hal yang mungkin dapat menjelaskan hal ini.

1. Sejumlah mekanisme pengendalian sosial dapat digunakan untuk mendorong ke arah penyesuaian. Akan tetapi, menurut Parson, pengendalian sosial adalah pertahanan lapis kedua. Sebuah sistem sosial berjalan dengan baik bila pengendalian sosial hanya digunakan dengan hemat.
2. Sistem sosial harus mampu menghormati perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu. Sistem sosial yang lentur lebih kuat ketimbang yang kaku, yang tidak dapat menerima penyimpangan.
3. Sistem sosial harus menyediakan berbagai jenis peluang untuk berperan yang memungkinkan bermacam-macam kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan diri mereka sendiri tanpa mengancam integritas sistem.

Dengan demikian, sosialisasi dan kontrol sosial merupakan mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangannya. Individualitas dan penyimpangan diakomodasi, tetapi bentuk-bentuk yang lebih ekstrem harus ditangani dengan mekanisme penyeimbang ulang. Jelas Parson lebih melihat sistem sebagai satu kesatuan daripada aktor di dalam sistem. Di sini, sistem mengontrol aktor, bukan sebaliknya aktor menciptakan dan mengendalikan sistem.

Menurut Parson, terpenting-pentingnya struktur dalam sistem sosial, yang paling penting adalah sistem kultural dalam masyarakat. Sistem kultural berada di puncak sistem tindakan, yang disebutnya dengan determinis kultural. Sistem kultural merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Kultur adalah kekuatan yang mengikat sistem tindakan, menengahi interaksi antar-aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain.

Norma dan nilai ini diinternalisasikan oleh aktor. Meski sistem kultural menjadi bagian dari suatu sistem tindakan, namun sistem kultural bisa mempunyai eksistensi tersendiri yang terpisah dari sistem tindakan, yaitu dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol, dan gagasan-gagasan. Aspek-

aspek dari sistem kultural tersedia untuk sistem sosial dan sistem personalitas, tapi sistem kultural tidak menjadi bagian dari kedua sistem itu.

Dari asumsi-asumsi inilah Parson menempatkan analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Masyarakat adalah bagian dari kolektivitas dalam sistem sosial yang menjadi perhatian. Secara keseluruhan teori struktural fungsional lebih menekankan ada harmoni dan sinergi dalam masyarakat sehingga tidak cukup memberikan perhatian pada masalah konflik di masyarakat dan cenderung tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan konflik secara efektif.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan dan berikan contoh dari pengertian sistem yang sudah Anda pelajari!
- 2) Jelaskan pengertian sistem sosial menurut Malina dan Talcot Parson!
- 3) Sebutkan dan jelaskan empat fungsi agar sebuah sistem dapat terjaga kelangsungan hidupnya!
- 4) Jelaskan pengertian status dan peran sebagaimana terdapat dalam definisi sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcot Parson yang melibatkan interaksi antar aktor!

Petunjuk Jawaban Latihan

Agar Anda dapat menjawab latihan soal secara tepat, maka pelajarilah secara cermat materi pelajaran yang ada pada kegiatan belajar 1. Apabila Anda masih mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Dalam kehidupan, setiap entitas dalam masyarakat merupakan sebuah kesatuan dalam kesatuan sistem. Sistem dalam pengertiannya yang paling umum adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang merupakan subsistem-subsistem yang membentuk konfigurasi

dalam rangkaian sistem yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap sistem mempunyai batas - batas lingkungan yang membedakannya dengan sistem-sistem lainnya, dan setiap sistem adalah menjadi bagian dari sistem yang lebih besar dan cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri.

Sistem sosial merupakan bangunan sistem yang mengatur hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hubungan sosial dimaksudkan untuk terjadinya sebuah kehidupan bersama yang harmonis dalam suatu tertib sosial berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam masyarakat melalui sistem sosial yang dikembangkan.

Dalam menjalankan fungsi dan eksistensinya dalam kehidupan sosial, maka setiap sistem harus memiliki empat fungsi yang dinamakan AGIL, yakni fungsi adaptasi (*adaptation*), fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), fungsi integrasi (*integration*), dan fungsi pemeliharaan pola (*latency*).



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Definisi sistem yang dikemukakan oleh Arthur D. Hall menekankan pada aspek....
 - A. hubungan antara objek dengan atribut-atributnya
 - B. hubungan antara aktor dalam interaksi sosial
 - C. kumpulan dari sesuatu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
 - D. pengelolaan reputasi organisasi

- 2) Nilai tambah yang diberikan oleh suatu sistem menurut Rechlin adalah....
 - A. keberhasilan mencapai tujuan
 - B. pertaliannya dengan elemen-elemen yang ada dalam sistem
 - C. kaitannya dengan penyelesaian sebuah proses
 - D. membentuk suatu keseimbangan yang menyeluruh

- 3) Sifat-sifat sistem menurut Talcot Parson adalah....
 - A. memiliki properti keteraturan
 - B. cenderung bergerak ke arah keteraturan dan keseimbangan
 - C. memelihara batas-batas lingkungannya
 - D. Ketiga jawaban di atas benar.

- 4) Pengertian sistem sosial yang dikemukakan oleh Talcot Parson menekankan pada aspek....
 - A. penciptaan citra aktor
 - B. penciptaan dan pemeliharaan hubungan sosial yang harmonis
 - C. hubungan interaksi dari aktor pelakunya
 - D. sosialisasi antar-aktor

- 5) Beberapa kata kunci yang ditawarkan oleh Talcot Parson untuk memahami fungsi sebuah sistem adalah....
 - A. integrasi
 - B. adaptasi
 - C. pencapaian tujuan
 - D. ketiga jawaban di atas benar

- 6) Fungsi pemeliharaan pola dalam sistem dilaksanakan oleh....
 - A. sistem sosial
 - B. sistem budaya
 - C. organisme perilaku
 - D. sistem kepribadian

- 7) Yang tertinggi di antara semua sistem tindakan adalah....
 - A. sistem sosial
 - B. sistem budaya
 - C. sistem kepribadian
 - D. organisme perilaku

- 8) Fungsi pencapaian tujuan dalam sistem dilakukan oleh....
 - A. sistem sosial
 - B. sistem budaya
 - C. sistem kepribadian
 - D. organisme perilaku

- 9) Menurut Talcot Parson status dan peran bukanlah merujuk pada status dan peran sang aktor yang berinteraksi, melainkan....
 - A. komponen struktural dari sistem sosial
 - B. bagian dari sosialisasi
 - C. bagian dari internalisasi nilai dan norma
 - D. bukan jawaban a, b, dan c

- 10) Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah....
- A. disposisi kebutuhan aktor
 - B. kemampuan aktor dalam internalisasi nilai dan norma
 - C. keberhasilan aktor dalam interaksi sosial
 - D. apa yang dilakukan aktor

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
<70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Memahami Sistem Politik dan Sistem Komunikasi**

Setelah mempelajari konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan sistem dan sistem sosial maka selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep mendasar lainnya yang menjadi landasan sistem komunikasi Indonesia. Konsep-konsep yang dimaksud adalah konsep tentang sistem politik dan konsep tentang sistem komunikasi.

Berbeda dengan sistem sosial Indonesia yang pada dasarnya merefleksikan sistem sosial pada entitas-entitas yang mendukung bangunan struktur sosial masyarakat Indonesia, maka sistem politik Indonesia lebih mudah untuk dikonstruksikan sebagai bangunan yang mengatur seluruh kehidupan politik masyarakat bangsa Indonesia. Dalam sistem sosial unit analisisnya pada satu entitas atau komunitas yang relatif memiliki dasar-dasar kehidupan sosial dan budaya yang relatif sama. Untuk menarik pada level struktur yang lebih makro yang mencakup keseluruhan entitas dalam kesatuan politik maka untuk sistem sosial tampaknya agak sukar untuk diberlakukan. Sebaliknya untuk sistem politik, karena unit analisisnya bisa pada level makro maka pemberlakuan sebuah sistem politik pada entitas kebangsaan yang lebih luas dalam kesatuan politik kebangsaan dapat diberlakukan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada dalam ikatan politik kebangsaan tersebut.

Masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan yang terdiri dari entitas-entitas yang hidup bersama yang terikat dalam kesatuan jalinan sistem baik dalam jalinan sistem sosial dan budaya maupun dalam jalinan sistem politik. Sebagai sebuah kesatuan entitas, setiap masyarakat memiliki kekhasan dalam khasanah kehidupan sosial politiknya. Demikian juga dengan masyarakat bangsa Indonesia sebagai sebuah kesatuan entitas yang terdiri dari berbagai entitas yang begitu beragam dari segi etnik, budaya, kehidupan sosial, religi, dan juga corak pengelolaan masyarakatnya. Indonesia merupakan kesatuan entitas masyarakat majemuk. Salah satu ciri dari masyarakat majemuk sebagaimana halnya dengan masyarakat Indonesia adalah besarnya potensi konflik yang ada dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari keberagaman masyarakatnya. Oleh karenanya, perlu sebuah telaah yang komprehensif

mengenai berbagai ciri dan karakter pada setiap entitas masyarakat Indonesia agar diperoleh satu simpul yang mengikat setiap entitas masyarakat bagi terjalannya integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Integrasi merupakan sebuah konsep politik kemasyarakatan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis di antara elemen-elemen masyarakat dalam suatu tertib sosial kemasyarakatan. Integrasi bukan berarti peluruhan terhadap setiap perbedaan yang melekat pada setiap entitas dan melebur pada satu identitas tunggal yang sama, melainkan adalah kesadaran sebagai bagian dari integralitas bangsa yang menghargai pluralitas dan berbagai perbedaan yang ada untuk hidup bersama.

Karena dalam kehidupan sosial masyarakat diperlukan pengaturan yang menyangkut kepemimpinan, kewenangan, dan penataan kehidupan masyarakat secara politis maka dengan sendirinya terbentuklah sebuah sistem pengaturan kehidupan masyarakat yang bersifat politis dan membentuk sebuah sistem politik. Cakupan dari sistem politik di antaranya adalah bahasan mengenai pengertian sistem politik itu sendiri, sistem politik di Indonesia dan sistem politik Indonesia, perbandingan mengenai sistem politik, perwakilan politik di Indonesia, sistem kepartaian dan pemilu, disentralisasi dan otonomi, masyarakat majemuk dan konflik identitas, potret masyarakat majemuk Indonesia, dan rancangan sistem sosial dan sistem politik Indonesia. Sistem politik adalah subsistem dari sistem kemasyarakatan, seperti halnya sistem ekonomi, sistem budaya, sistem hukum, dan sebagainya. Sistem politik adalah kesatuan alur yang mengatur keseluruhan kehidupan politik masyarakat yang menyangkut lembaga negara, partai politik, dan kelompok-kelompok penekan.

Berbicara mengenai sistem politik maka hakikat yang mendasarinya adalah pengertian dari politik itu sendiri. Hakikat politik adalah kekuasaan, kekuasaan untuk melakukan pengaturan, yang diperoleh melalui suatu perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Hal ini disimpulkan dari studi Hawkesworth dan Maurice Kogan yang menyatakan "...politics is better understood as a struggle for power" (2004: 23), dan apa yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell tentang paradigma politik dengan rumusan postulat "who gets what, when and how" (2004: 23). Dasar dari paradigma kekuasaan adalah pada konsepsi tentang manusia yang dalam gerak kehidupannya didorong oleh *the libido dominandi*, yakni motif atau hasrat untuk berkuasa (*the will to power*). Oleh karenanya, politik menjadi sebuah *zero sum game* dari persaingan terus menerus bagi sebuah dominasi atau eksploitasi yang

menjadi kepentingan atau tujuannya. Cakupannya tidak hanya pada level institusi negara, tapi juga analisis politik terhadap kenyataan-kenyataan empiris yang bisa diamati.

Windlesham mengatakan politik “ *as the activity of attending to the general arrangements of a set of people*. (Tracey, 1977: 3). Jadi, politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap warga masyarakat. Dalam melakukan pengaturan tentunya diperlukan kewenangan atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Tanpa memiliki kewenangan dan kekuasaan maka aktivitas pengaturan tentunya tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, konsep kekuasaan tetap menjadi konsep utama dalam kegiatan dan kajian politik (Issac, 2002: 56).

Dari pengertian di atas, politik dapat disimpulkan sebagai kegiatan dan atau kajian yang mencakup perjuangan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta pengaturan melalui kekuasaan. Bentuk dan manifestasi politik mencakup pemilihan umum, konflik-konflik kelompok dan kebijakan negara yang merupakan peristiwa dan proses dalam dunia politik melalui tanggung jawab bersama antara institusi dan agen; dan dapat juga pada masalah konstitusi atau aturan yang dapat memberikan jaminan kehidupan bersama (masyarakat) dengan lebih baik.

Kekuasaan sebagaimana dikemukakan Robert Litke dalam tulisannya “*Domination and Other Kinds of Power*”, memiliki banyak spesies, dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia (1997: 5). Kekuasaan berakar kata dari bahasa Latin *posse* yang berarti *to be able*. Pada pengertiannya, yang mendasar kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk bertindak atau kemampuan untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Litke menyebutnya sebagai *generic power*. Selain *generic power*, Litke membedakan kekuasaan dalam empat konsep lainnya, yakni *dominating power*, *epistemic power*, *concertive power*, dan *developmental power* (1997: 5).

Domination atau *dominating power* adalah kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan yang dominan untuk memberikan perintah, memerintah, atau mengendalikan pengaruhnya pada satu situasi tertentu. Sepanjang sejarah literatur ilmu politik modern sejak Machiavelli dan Thomas Hobbes hingga praktik politik di abad ini, tetap menekankan pada *dominating power*, yang berarti *has to do with power*, yang dipahami sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan melakukan pengontrolan kepada orang lain (Machperson, 1975: 42-45).

Epistemic power adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengetahuan (*as ability to know*). Kemampuan yang mencakup seluruh dasar dalam mengambil tindakan, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan dan mengetahui semua akibatnya, serta tahu cara bagaimana mengatasi atau keluar dari semua akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi seseorang mempunyai kemampuan atau kekuasaan epistemik kalau dia dalam melakukan sesuatu, mengetahui bagaimana dia melakukan itu dan memiliki dasar-dasar tindakan yang diperlukan (Litke, 1997: 9).

Concertive power adalah kekuasaan yang dikelola secara bersama-sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Arendt, kekuasaan bertalian dengan kemampuan manusia yang tidak hanya kemampuan untuk bertindak, akan tetapi tindakan yang dilakukan secara bersama. Oleh karena kekuasaan tidak pernah menjadi milik individu, kekuasaan itu milik kelompok dan akan tetap eksis sepanjang kelompok itu menjaganya bersama (Litke, 1997: 9).

Developmental power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan pengembangan; kemampuan untuk menggunakan dan mengembangkan kapasitas-kapasitas, seperti pemahaman yang rasional, pertimbangan moral dan tindakan, kreasi estetik dan kontemplasi, aktivitas emosional tentang persahabatan dan cinta, pengalaman religius, ketakjuban atau keingintahuan, kapasitas mengontrol aktivitas-aktivitas fisik, mental, dan estetika (Litke, 1997: 9), Litke memformulasikan konsep *developmental power* ini dalam dua cakupan, meliputi kemampuan untuk mengembangkan: 1) semua kapasitas manusia yang esensial untuk partisipasinya di berbagai interaktivitas budaya sebagaimana telah disebutkan, 2) kapasitas untuk memilih bagaimana mengonsepsualisasikan hal-hal tersebut (Litke, 1997: 12).

Dalam kesimpulannya, Litke menyatakan bahwa masing-masing konsep kekuasaan ini merupakan prasyarat (*prerequisites*) bagi konsep yang lain. Kekuasaan memerlukan kekuatan pengaruh (*domination*), dilakukan dengan pengetahuan (*epistemic*) dan kerja sama (*concertive*), dan dengan mengembangkan kapasitas kemanusiaan yang dimiliki (*developmental*). Tidak ada yang direduksi satu dengan lainnya. Kehidupan yang beradab memerlukan sejumlah tingkatan dominasi dan kepatuhan. Akan tetapi dominasi yang berlebihan dapat merusak dan menyebabkan terjadinya kehancuran. Oleh karenanya, dominasi harus dilakukan secara bijaksana.

Dalam pengaturan kehidupan politik, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur bagaimana mekanisme kekuasaan itu dilakukan. Namun,

setiap negara memiliki keunikan berdasarkan kenyataan sejarah sosial dan politiknya sehingga dapat dikatakan tidak ada sistem politik suatu negara yang benar-benar sama dengan sistem politik negara lainnya (Syafie, 2006: 4). Mengenai sistem politik sendiri ada beberapa definisi atau pengertian yang dikemukakan:

1. Gabriel Almond mendefinisikan sistem politik sebagai: "...the political system is that system of interaction to be found in hall independence societies, which performs the function of integration and adaptation" (Almond, 1960: 5). Dalam penghentian dari definisi ini Gabriel Almond menekankan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ada pada masyarakat yang merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
2. Robert Dahl mendefinisikannya sebagai: "A political system is any persistent pattern of human relationships that involves the significant extent, control, influence, power, rules or authority" (Dahl, 1977: 3). Di sini Robert Dahl merumuskan sistem politik sebagai pola hubungan antar manusia yang terjadi secara terus menerus yang melibatkan hal-hal yang luas seperti pengawasan, pengaruh, kekuasaan, aturan-aturan atau kewenangan.

Dari dua definisi sistem politik yang dikemukakan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang melibatkan pengawasan, pengaruh, kekuasaan, aturan-aturan atau kewenangan untuk tercapainya fungsi integrasi dan adaptasi dalam masyarakat.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.

Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan

dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter (http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik).

Indonesia dibangun di atas landasan keberagaman masyarakatnya yang terdiri dari berbagai etnik, ras, dan suku bangsa. Masing-masing etnik, ras, dan suku bangsa memiliki perbedaan-perbedaan dalam masalah sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, Indonesia berada di atas satuan-satuan yang secara sosiologis, antropologis, dan politis berbeda satu sama lainnya. Perbedaan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa multi-etnis dengan struktur masyarakat majemuk yang rentan terhadap berbagai konflik di antara entitas-entitas masyarakatnya yang berbeda itu. Pada masa lalu, konflik dapat terjadi di antara masyarakat yang berbeda dalam identitas kelompoknya, dan berakhir pada penguasaan atau dominasi kelompok yang lebih kuat dalam bentuk penaklukan terhadap kelompok lainnya yang lebih lemah.

Dengan demikian, Indonesia merupakan sebuah masyarakat bangsa yang dibangun dari entitas-entitas suku bangsa yang sangat majemuk dalam arti yang sebenar-benarnya. Tidaklah mengherankan kalau masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat bangsa yang penuh warna. Demikian juga dengan kehidupan sosial dan sistem sosial yang dikembangkan. Setiap entitas memiliki ciri yang mungkin berbeda dengan entitas sosial lainnya. Dalam kehidupan politik setiap entitas suku bangsa pada dasarnya memiliki sistemnya tersendiri, namun sejak mengikatkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka secara politis setiap entitas yang ada haruslah mengikuti sistem yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Sejak kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, dan Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, hingga saat ini telah berlaku beberapa sistem politik. Meski secara formal sistem politik di Indonesia mendasarkan diri pada sistem politik yang demokratis, namun dalam prakteknya demokrasi yang dimaksudkan sangatlah khas Indonesia yang diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan politik saat itu. Oleh karenanya, dalam perjalanan sejarah politik

bangsa dikenal beberapa sistem politik yang berlaku seperti Demokrasi liberal (konstitusional), Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi Pasca Reformasi yang pada tataran praksisnya satu sama lain tidaklah sama (Budiardjo, 2008: 128-134).

Masyarakat majemuk pada umumnya dipersatukan dalam kesatuan identitas bangsa dan masuk dalam wadah negara karena dipersatukan oleh suatu paksaan kekuatan yang dominan. Pada masa kerajaan banyak daerah-daerah dari etnik atau sub-etnik tertentu yang ditaklukkan dan menjadi bagian dari daerah kekuasaan kerajaan yang menaklukkannya. Perangkat hukum, sosial, dan politik merujuk pada aturan yang berlaku pada kerajaan penakluknya yang pelaksanaannya diawasi oleh penguasa-penguasa wilayah yang diangkat oleh kerajaan penakluk. Pada masa penjajahan Belanda pusat kekuasaan beralih pada Pemerintahan Hindia Belanda. Kesatuan daerah jajahan yang mengikat entitas-entitas suku bangsa di dalamnya dilakukan melalui bentuk kursi kekuasaan birokrasi dan militer.

Perangkat hukum dan sistem politik pemerintahan merupakan perpanjangan dari sistem hukum dan politik pemerintahan kerajaan Belanda yang dirancang untuk melestarikan dominasi kekuasaan penjajah di tanah jajahannya. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat suku bangsa dalam masyarakat jajahan dilakukan melalui golongan perantara yang sangat diuntungkan dalam sistem sosial politik yang demikian itu. Posisi ini di masa lalu dipegang oleh golongan masyarakat keturunan Cina, Arab, dan Timur Asing yang khususnya menangani sektor perekonomian dan mendapatkan *previlage* secara sosial di atas bangsa pribumi yang terjajah.

Sementara para raja, sultan dan para bangsawan yang sebelumnya memegang kendali pemerintahan, pada masa penjajahan ter subordinasi pada kekuasaan penjajah dan banyak digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan penguasaan. Dengan demikian, tersusunlah struktur masyarakat dalam beberapa golongan. Golongan yang paling teratas dan paling dominan adalah bangsa Belanda dan bangsa kulit putih lainnya. Kemudian berturut-turut adalah bangsa Cina, Arab, dan bangsa Timur Asing lainnya. Baru lapisan terbawah adalah bangsa pribumi yang juga dibedakan menjadi dua yakni yang telah mengenal peradaban dan mengenyam sistem pendidikan Belanda dan yang masih terbelakang dan primitif. Dalam struktur yang berlaku nasional ini terdapat struktur-struktur hubungan kekuatan dominan-minoritas yang bervariasi sesuai konteks-konteks hubungan dan kepentingan yang berlaku

Demikian pula halnya pada masa penjajahan pemerintahan militer Jepang. Dalam mempersatukan daerah jajahannya secara politik, pemerintahan militer Jepang menerapkan hukum militer yang sangat keras, memosisikan diri sebagai kekuatan pemaksa yang mengeksploitasi seluruh aspek kehidupan masyarakat dari bangsa yang dijajahnya. Kondisi yang sama yang dialami suku-suku bangsa yang dijajah ini pada akhirnya melahirkan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Perasaan senasib, sepederitaan dan sepenanggungan melahirkan rasa saling ketergantungan pada masyarakat. Melalui proses sosial dan politik yang cukup lama, warga masyarakat Hindia Belanda yang kemudian menjadi warga penjajahan Jepang menyadari pentingnya memerdekakan diri dari penjajahan Jepang yang amat menyengsarakan mereka.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dipimpin oleh Soekarno-Hatta maka suku-suku bangsa di Indonesia menyatakan mengikatkan dirinya sebagai kesatuan bangsa dalam wadah negara Indonesia. Dari sini terbentuklah suatu tatanan masyarakat baru dalam sebuah kerangka sistem sosial dan sistem politik Indonesia. Adapun sistem politik Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Inu Kencana Syafii adalah sebagai berikut: “Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik, yang cenderung agak sentralistik karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang integralistik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparaturnya negara serata segenap dana dan daya, demi tercapainya tujuan nasional, dan terlaksananya tugas negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Hal ini karena para *Founding Fathers* menginginkan negara ini bersatu pada mulanya, mengingat banyaknya suku, agama, pulau, bahasa dan corak ragam lainnya di negeri ini” (Syafii, 2006: 5).

SISTEM KOMUNIKASI

Di antara sistem-sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, hal yang mungkin relatif baru dalam wacana pembahasannya adalah sistem komunikasi Indonesia. Semua sistem kemasyarakatan yang ada bermuara pada sistem sosial, apakah itu sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik,

dan tentunya sistem-sistem lainnya yang mengatur hubungan pola interaksi di antara subsistem-subsistem yang ada. Sistem komunikasi juga merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Oleh karenanya, sistem komunikasi Indonesia juga merupakan kenyataan sosial yang berakar pada sistem sosial yang merujuk pada nilai-nilai budaya dalam sistem budaya yang ada di Indonesia. Mengambil konsepsi sistem tindakan Talcot Parson, jelas bahwa semua sistem tindakan bermuara pada sistem budayanya. Karena yang tertinggi dalam sistem tindakan adalah pada sistem budaya, yang kemudian mewarnai sistem sosial, sistem kepribadian, dan organisme perilaku.

Masing-masing sistem tindakan ini membentuk subsistem dalam menjalankan fungsinya. Sistem tindakan yang paling bawah yakni organisme perilaku yang merupakan interaksi antar aktor dalam kehidupan sosial, mewujud dalam subsistem ekonomi dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Sistem ekonomi dalam hal ini adalah subsistem dalam masyarakat yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri (*adaptation*) terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. Melalui pekerjaan ekonomi, aktor menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal.

Sistem tindakan di atas organisme perilaku adalah sistem kepribadian. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Untuk menjalankan fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), sistem kepribadian mewujud pada subsistem pemerintahan. Sistem pemerintahan atau sistem politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan, memobilisasi aktor, dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem kepribadian dikontrol oleh sistem sosial dan sistem kultural karena sistem kepribadian merupakan hasil sosialisasi dan internalisasi dari sistem sosial dan sistem kultural.

Di atas organisme perilaku dan kepribadian adalah sistem sosial. Sistem sosial menjalankan fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem sosial mewujud pada sistem kemasyarakatan (seperti hukum, dan sebagainya) yang melaksanakan fungsi integrasi serta mengoordinasikan berbagai komponen dalam masyarakat.

Yang berada di puncak sistem tindakan adalah sistem budaya. Sistem budaya melaksanakan fungsi pemeliharaan pola (*latency*) dengan

menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pemelihara pola, sistem budaya mewujudkan pada subsistem *fiduciari*. Sistem *fiduciari* (seperti keluarga, sekolah, dsb.) menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur tersebut, dan menjadi petunjuk dalam pola perilaku.

Sistem budaya merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial, kekuatan yang mengikat seluruh sistem tindakan, menengahi interaksi antar-aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Budaya mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain. Menurut Parson, sepenting-pentingnya struktur dalam sistem sosial, yang paling penting adalah sistem kultural dalam masyarakat. Sistem kultural berada di puncak sistem tindakan, yang disebutnya dengan determinis kultural.

Budaya adalah sistem simbol yang terpolakan, teratur, yang menjadi sasaran orientasi para aktor dalam rangka penginternalisasian aspek-aspek kepribadian dan pola-pola yang sudah terlembagakan dalam sistem sosial. Budaya bersifat subjektif dan simbolik, oleh karena itu kultur mudah ditularkan dan dipindahkan dari satu sistem sosial ke sistem sosial lain melalui penyebaran (difusi), atau dari satu kepribadian yang lain melalui proses belajar dan sosialisasi. Sifat simbolisme (subjektivitas) dari kultur menempatkan kultur pada posisi mengendalikan sistem tindakan yang lain (Ritzer, 2008: 130). Walau sistem budaya merupakan bagian dari sistem tindakan, namun menurut Parson sistem budaya bisa mempunyai eksistensinya sendiri di luar sistem tindakan, yakni dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol dan gagasan-gagasan. Aspek-aspek dari sistem budaya tersedia untuk sistem sosial dan sistem kepribadian. Akan tetapi, sistem budaya tidak menjadi bagian dari kedua sistem itu.

Dengan menggunakan skema sistem tindakan dari Talcot Parson, hal yang perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan bahasan tentang sistem komunikasi adalah di mana sistem komunikasi berada dalam serangkaian sistem tindakan yang dikemukakan Talcot Parson? Konsepsi tentang sistem komunikasi sendiri memiliki banyak dimensi. Sistem komunikasi dapat bermakna pada sistem bahasa, dapat bermakna pada sistem pola model komunikasi, dapat juga bermakna pada sistem radio, komputasi, digital,

seluler, televisi, telekomunikasi, dan yang sejenisnya dengan perangkat mekaniknya.

Dalam sistem bahasa, sistem komunikasi merupakan serangkaian tanda, penanda, dan pertanda yang menghasilkan simbol-simbol bahasa yang mengandung arti. Dalam pola model komunikasi, sistem komunikasi merupakan transmisi pesan dari pengirim kepada penerima dengan melibatkan serangkaian *encode* dan *decode* terhadap lambang-lambang yang digunakan dan dengan mekanisme umpan balik. Sedangkan dalam sistem elektrik, sistem komunikasi ini banyak sekali memiliki varian pengertiannya, sebanyak jumlah perangkat komunikasi yang ada. Sebagai contoh adalah sistem komunikasi pada sistem radio seluler, Layman mendefinisikannya sebagai "sistem yang menggunakan transmisi radio untuk menyediakan layanan telepon..." (Bedel, xviii). Dalam telekomunikasi, sistem komunikasi didefinisikan sebagai kumpulan jaringan komunikasi individu, sistem transmisi, stasiun *relay*, stasiun tributari, dan peralatan terminal data (*data terminal equipment*) yang mampu melakukan interkoneksi dan interoperasi untuk membentuk satu kesatuan yang menyeluruh (http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_system).

Akan tetapi, tentu bukan pengertian-pengertian seperti itu yang dimaksudkan di sini. Sistem komunikasi yang dimaksudkan tentu dalam kerangka dimensi kemasyarakatan dari sistem komunikasi. Dalam dimensi kemasyarakatan, sistem komunikasi mencakup semua yang terkait dengan gerak kehidupan manusia dengan semua perangkat kehidupannya. Komunikasi merupakan sesuatu yang inheren dalam kehidupan manusia sehingga komunikasi dapat mencakup semua sistem dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Dalam sistem budaya misalnya, di dalamnya juga akan terdapat sistem komunikasi sehingga melahirkan komunikasi budaya. Budaya atau kebudayaan merupakan unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat dan menjadi tonggak penopang tegaknya sebuah peradaban. Budaya merupakan cara hidup atau cara berperilaku yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati untuk mengatur kehidupan bersama dalam sebuah entitas kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan bentuk pelembagaan dari cara hidup atau cara berperilaku yang didasarkan atas nilai-nilai dan norma-norma.

Kebudayaan merupakan hasil dari suatu proses sosial. Semua proses sosial yang membentuk kebudayaan dengan artifak, mentifak, dan

sosifiknya, bertumpu pada komunikasi yang merupakan inti dari semua hubungan sosial (Wright: 1983). Dalam perspektif kebudayaan, komunikasi merupakan proses simbolik di mana realita diproduksi, dipelihara, diperbaiki, dan ditransformasikan (Carey: 1989). Pada bagian lain dikatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses di mana suatu bagian budaya diciptakan, diubah, dan ditransformasikan. Dilihat dari segi perilaku komunikasi, lambang-lambang yang dipakai, pesan yang dikomunikasikan dan media komunikasi yang digunakan, semuanya merupakan perwujudan dari kebudayaan itu sendiri.

Jadi, komunikasi merupakan aspek paling penting dalam kebudayaan, apalagi kalau istilah kebudayaan diartikan sebagai seluruh pencapaian dari kegiatan manusia atau semua yang ditambahkan manusia kepada alam, dan meliputi semua aspek penghidupan dan semua cara untuk mengerti. Dalam hal ini, komunikasi merupakan komponen pokok di dalam semua bidang penghidupan, dengan demikian di setiap kebudayaan.

Media komunikasi merupakan artifak budaya yang melahirkan budaya atau yang menjadi sarana bagi lahirnya budaya (baru). Oleh karenanyalah, media komunikasi menjadi bagian yang paling sentral dalam studi komunikasi (Little John). Budaya merupakan hasil dari kreasi manusia yang salah satunya diproduksi, direproduksi dan didistribusikan melalui media. Dengan demikian, media dapat menjadi pusat bagi tumbuhnya, tidak hanya budaya baru akan tetapi juga kekuasaan (dominasi). Melalui komunikasi suatu kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang, disosialisasikan, dilestarikan dan diwariskan dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi sehingga membentuk suatu komunitas atau masyarakat budaya dengan identitas budaya yang unik dan *distinctive* dengan komunitas budaya lainnya.

Dengan demikian, tampak sekali peran penting komunikasi dalam membentuk identitas kebudayaan dan sebagai pelestari kebudayaan. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa komunikasi kebudayaan manapun akan musnah (Fiske: 1990). Oleh karenanya, ketika mempelajari kebudayaan pada saat yang sama sesungguhnya juga mempelajari komunikasi, sebagaimana ditegaskan oleh James W. Carey: “*But What is called the study of culture also can be called the study of communication...*” (Carey: 1989).

Dalam sistem sosial komunikasi menjadi elemen mendasar bagi terjadinya interaksi sosial dan proses-proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Proses-proses sosial itu kemudian melembaga dalam sebuah

struktur sosial dengan kelebagaannya dan juga sistem sosialnya. Sebagaimana diketahui, interaksi yang terjadi antar aktor dalam kehidupan sosial hanya dapat dilakukan apabila terdapat kontak dan komunikasi. Melalui interaksi akibat kontak dan komunikasi inilah kemudian terjadi proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial melibatkan komunikasi sosial, baik dengan menggunakan komunikasi asli (diri) maupun komunikasi bermedia, termasuk di dalamnya adalah media massa. Charles R. Wright mengatakan bahwa komunikasi massa pada intinya adalah suatu proses sosial (Wright, 1986). Hal ini dikarenakan individu-individu yang terlibat dalam komunikasi massa mengadakan interaksi dan menyerap apa yang dikomunikasikan dalam kehidupan sosialnya. Oleh karenanya, dalam mendefinisikan komunikasi massa Charles R. Wright lebih melihat pada perspektif sosiologisnya yang menyatakan komunikasi massa sebagai "jenis khusus dari komunikasi sosial yang melibatkan berbagai kondisi pengoperasian khususnya pada sifat khalayak, sifat bentuk komunikasi dan sifat komunikatornya" (Wright, 1986). Lebih-lebih lagi apa yang dikomunikasikan harus melibatkan kehidupan sosial khalayaknya.

Sistem kepribadian fungsi utamanya adalah pada pencapaian tujuan (*goal attainment*) yang diwujudkan dalam subsistem pemerintahan. Ini berarti menyangkut sistem komunikasi organisasional. Sistem pemerintahan sesungguhnya merujuk pada semua bentuk organisasi baik organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi perusahaan ataupun bentuk-bentuk organisasi lainnya. Walaupun menggunakan istilah sistem pemerintahan, tidak lain karena dalam organisasi terdapat kepemimpinan yang menjadi simpul penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Pimpinan adalah aktor yang bertanggung jawab menjaga dan mengembangkan kelangsungan organisasi dengan menyelenggarakan pemerintahan di lingkungan organisasinya. Pemimpin harus menjalin hubungan yang baik dengan elemen-elemen yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya adalah dengan para bawahannya yang menjadi aparatur untuk mencapai perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik dengan pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan demi untuk kelangsungan hidup organisasi.

Dalam organisasi peran komunikasi akan sangat menentukan bagi lancarnya mekanisme sistem organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dengan demikian, alur sistem komunikasi dalam sistem kepribadian ini adalah pada sistem komunikasi organisasi, yakni sistem komunikasi timbal balik antara pimpinan dengan bawahan yang menjadi komponen-komponen sistem dalam

organisasi yang diperlukan untuk membangun kerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sistem organisme perilaku adalah sistem yang terjadi antar aktor dalam lingkungan sosial. Dalam interaksi antar-aktor dalam kehidupan sosial mencakup dua sistem komunikasi, yakni sistem komunikasi intrapersona dan sistem komunikasi antar persona. Sistem komunikasi intrapersona adalah sistem komunikasi yang melibatkan elemen-elemen komunikasi yang ada pada diri aktor. Sedangkan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem komunikasi antar aktor dalam proses interaksi yang terjadi.

Dengan berpedoman pada sistem tindakan Talcot Parson maka dalam dimensi sosial sistem komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Analisis Sistem Komunikasi berdasarkan Sistem Tindakan Talcot Parson

Sistem Kultural/ Sistem Komunikasi Budaya	Sistem Sosial/ Sistem Komunikasi Sosial
Organisme Perilaku Sistem Komunikasi Intra dan Antar Persona	Sistem Kepribadian/ Sistem Komunikasi Organisasi

Selain organisme perilaku yang merupakan sistem komunikasi intra dan interpersonal yang bersifat individual maka sistem komunikasi pada tiga sistem tindakan lainnya bersifat kelembagaan. Sistem komunikasi pada sistem kepribadian dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada pencapaian tujuan organisasi. Sistem komunikasi pada sistem sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada integrasi sosial. Sistem komunikasi pada sistem kultural dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada pemeliharaan pola atau pewarisan nilai-nilai dalam masyarakat.

Sistem komunikasi dapat bersifat komunikasi asli yang menggunakan faktor diri (*oral/speech/verbal communication and non verbal communication*), ataupun komunikasi dengan menggunakan media. Dalam konteks waktu, media komunikasi dapat dibedakan pada media komunikasi tradisional dan media komunikasi modern. Dikotomi media komunikasi ini

tidak terlepas dari perjalanan sejarah peradaban manusia dengan teknologi komunikasinya.

Irfin Fang dan Christina Ross membagi sejarah perkembangan media berdasarkan pada jenis bentuk medianya, yang terdiri dari *early media*, *print media*, *electrical media*, *mass media*, dan *digital media* (www.mediahistory.umn.edu/time/century.htm).

Early media merupakan media awal yang digunakan dalam peradaban manusia, yakni *oral* dan *scribal* (tulisan). Peradaban komunikasi manusia kemudian beralih pada *print media*, yang di dalamnya tercakup *printing*, *publishing*, *journalism*, *photography*, *advertising*, dan *comics*. Perkembangan fase ke tiga dalam invensi teknologi komunikasi adalah pada *electrical media*, yang di dalamnya terdapat *telegraphy*, *telephony*, *recorded music*, dan *video game*. Fase lebih lanjut adalah *mass media* yang terdiri dari radio, film dan televisi. Jenis bentuk media yang terakhir adalah **digital media**, yang di dalamnya terdapat *computing* dan internet (*interconnection networking*).

Sementara Marshal McLuhan membagi sejarah perkembangan media dalam empat periode masa, yakni *The Tribal Age*, *The Age of Literacy*, *The Print Age*, dan *The Electronic Age* (Griffin, 2003: 345-349). *The Tribal Age* merupakan masa-masa awal sejarah perkembangan media manusia pada masa prasejarah hingga ditemukannya artifak-artifak tertulis yang menandai masa sejarah manusia. Dikatakan *The Tribal Age* karena sifat komunalisme masyarakat ketika itu yang mendasarkan atas entitas kesukuan. McLuhan mengatakannya sebagai *an acoustic community*, yakni komunitas masyarakat yang mengandalkan pada kemampuan lisan dan pendengaran dalam berkomunikasi.

Menurut Marshal McLuhan, masyarakat tribal mengandalkan kemampuan akustik dengan mengembangkan kemampuan mendengar, menyentuh, merasakan, dan membaui dibandingkan dengan mengembangkan kemampuan visualisasi. Artinya, masyarakat tribal lebih memberdayakan otak bagian kanan yang mendominasi otak bagian kiri. Indera pendengaran adalah raja, mendengarkan adalah kepercayaan. Anggota masyarakat dari budaya oral yang demikian ini tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk mengambil peran sebagai pengamat yang lepas. Pada umumnya, mereka bertindak dan bereaksi secara emosional pada waktu yang sama. Kesesuaian pada kelompok menjadi norma tanpa pengecualian. Ini merupakan ciri masyarakat primitif yang oleh McLuhan dikatakan memiliki kehidupan yang lebih kompleks daripada keturunan mereka yang berbudaya *literacy* karena

pendengaran tidak sama dengan penglihatan, dan tentu tidak memiliki kemampuan untuk memilih stimuli sebagaimana yang dapat diamati secara visual.

Peralihan dari masa masyarakat tribal ke masa masyarakat literasi ditandai dengan ditemukannya *phonetic alphabet* yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. McLuhan menandai masa peralihan tersebut berlangsung selama 500 tahun dari 2000 SM sampai 1500 SM. Di sinilah masyarakat mulai mengembangkan kemampuan visualnya dalam berkomunikasi dengan menggunakan *phonetic alphabet* dan melahirkan apa yang oleh McLuhan dikatakannya sebagai *The Age of Literacy*. Penemuan *phonetic alphabet* melahirkan budaya baru dalam berkomunikasi melalui kegiatan menulis dan membaca. Pada masyarakat *literacy* kemampuan mendengar bertukar dengan kemampuan membaca dengan mengamati objek-objek visual dalam bentuk *alphabet phonetic* melalui pandangan mata. Dengan demikian, otak bagian kiri dapat berkembang dalam masyarakat visual. *Literacy* memungkinkan orang keluar dari kolektivitas masyarakat tribal dan melibatkan diri dalam kehidupan pribadi yang bebas dan berbudaya, yang tetap dapat mengakses informasi tanpa harus terkungkung dalam norma kelompok tribalisme.

Abad 15 M tampaknya menjadi tonggak baru dalam perkembangan sejarah peradaban manusia khususnya di tahun 1450 M di Jerman ketika Gutenberg menemukan mesin cetak untuk mencetak pesan-pesan tertulis. Melalui mesin cetak inilah pesan-pesan tertulis dapat digandakan dalam jumlah besar dan dapat didistribusikan secara masif sehingga dapat menjangkau khalayak dalam jumlah yang lebih besar dan lebih luas. McLuhan menyebutkannya sebagai *The Print Age* atau era media tercetak yang melahirkan terbitan-terbitan dan juga pers tercetak yang menurutnya merupakan prototipe dari revolusi industri. *The Print Age* ini pada akhirnya melahirkan varian-varian keluarannya dalam bentuk percetakan dan penerbitan, jurnalisme, fotografi, periklanan, dan komik.

Meski masa-masa media tercetak ini telah melahirkan banyak karya-karya tertulis yang terdokumentasikan dengan baik dan terdistribusikan dengan luas, namun masa-masa kejayaan media tercetak segera saja berlalu dengan ditemukannya perangkat pengirim pesan elektronik oleh Samual Morse pada tahun 1850 M. McLuhan mengatakan: "the power of the printed word is over: ...had its obituary tapped out by the telegraph". Telegraph telah menandai masuknya era baru dalam peradaban masyarakat ke

masyarakat berbasis media elektronik. McLuhan menyebutnya dengan *The Electronic Age*. Penemuan telegraph segera saja diikuti oleh penemuan-penemuan lainnya di bidang media elektronik lainnya seperti *Telephone*, *Radio*, *Film Projector*, *Phonograph*, *Television*, *Photocopier*, *Answering Machine*, *Computer*, *VCR*, *Compact Disc*, *Holograph*, *Cellular Phone*, *Fax*, *DVD*, *Modem*, dan *Internet* hingga pada abad 21 ini (Griffin, 2003: 347).

Dari sekuensial sejarah perkembangan media maka yang dimaksud dengan media komunikasi tradisional adalah media komunikasi pada masa awal perkembangan peradaban manusia yang berkomunikasi secara *oral* dan *scribal* dengan komunikasi lisan, sebagian lisan maupun dengan peralatan komunikasi tradisional lainnya. Sistem komunikasi tradisional ini masih eksis hingga sekarang ini meski didera oleh berbagai media komunikasi modern lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem media komunikasi modern adalah seluruh media yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat teknologi modern, baik yang berbasis mekanik, elektrikal maupun digital seperti media cetak, radio, televisi, film, internet, dan sebagainya.

Di Indonesia kedua sistem komunikasi, baik tradisional maupun modern memiliki eksistensinya masing-masing, meski tidak dapat dipungkiri bahwa media komunikasi modern lebih dominan eksistensinya dari pada media komunikasi tradisional. Sistem komunikasi Indonesia berdiri di atas realitas dari dua entitas sistem komunikasi ini, tradisional dan modern. Mengonstruksi sistem komunikasi Indonesia secara normatif tentu harus berpedoman pada aturan hukum yang tertulis baik pada Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang lainnya yang terkait. Secara filosofis semua produk perundang-undangan yang berlaku mendasarkan pada filosofi bangsa dan di atas nilai-nilai budaya bangsa. Filosofi bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa mendasari terbentuknya sistem sosial dan sistem politik Indonesia. Atas dasar nilai-nilai yang ada pada sistem sosial dan sistem politik inilah kerangka sistem komunikasi Indonesia dikembangkan.

Pada alinea 4 Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat dapat menjadi dasar bagi sistem komunikasi Indonesia. Dalam mukadimah dikemukakan:

” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya pada Pasal 28 dikemukakan: ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada Pasal 28 F dikemukakan: ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Implementasi Pasal 28 ini adalah pada Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-undang 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Pada intinya, dari semua undang-undang terkait tentang komunikasi mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan filosofisnya. Dengan demikian, sistem komunikasi Indonesia pada hakikatnya adalah pengejawantahan pemenuhan hak warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Artinya, adalah hak warga negara untuk menyelenggarakan komunikasi dan hak warga negara untuk mendapatkan informasi.

Namun demikian, hak warga negara untuk menyelenggarakan komunikasi melalui lembaga-lembaga komunikasi diatur sedemikian rupa yang pada intinya bahwa komunikasi diselenggarakan dalam sebuah sistem yang ditujukan untuk sesuatu yang terkait dengan:

1. Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol masyarakat atas berbagai keadaan yang menyangkut kehidupan bersama. Oleh karena kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi adalah perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa, pembangunan watak, dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia, mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

3. Menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, perekat sosial dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari penjabaran terhadap aspek-aspek normatif pada sistem komunikasi Indonesia maka sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah sistem komunikasi yang terdiri dari komunikasi tradisional dan komunikasi modern yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, baik secara filosofis, sosial maupun politik yang pada dasarnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dengan informasi yang mendidik, menghibur, dan memiliki fungsi kontrol dalam kehidupan bersama, yang melestarikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa, membangun watak dan kepribadian bangsa, dan menjadi perekat sosial bagi kesatuan dan persatuan bangsa, integrasi nasional, kemajemukan masyarakat, dan mendukung kehidupan ekonomi dan pemerintahan sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan bermartabat dalam pergaulan antar bangsa.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan karakteristik masyarakat Indonesia dan problema yang dihadapi terkait dengan karakteristik masyarakat bangsa Indonesia.
- 2) Jelaskan pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond dan Robert Dahl.
- 3) Jelaskan sistem komunikasi dengan menggunakan skema sistem tindakan Talcot Parson.
- 4) Jelaskan karakteristik sistem komunikasi Indonesia.

Petunjuk Jawaban Latihan

Agar Anda dapat menjawab latihan soal secara tepat maka pelajari lah secara cermat materi pelajaran yang ada pada Kegiatan Belajar 1. Apabila Anda masih mengalami kesulitan, diskusikanlah dengan teman atau tutor Anda.



Indonesia merupakan kesatuan entitas masyarakat majemuk. Salah satu ciri dari masyarakat majemuk sebagaimana halnya dengan masyarakat Indonesia adalah besarnya potensi konflik yang ada dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari keberagaman masyarakatnya.

Integrasi merupakan sebuah konsep politik kemasyarakatan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis di antara elemen-elemen masyarakat dalam suatu tertib sosial kemasyarakatan. Integrasi bukan berarti peluruhan terhadap setiap perbedaan yang melekat pada setiap entitas dan melebur pada satu identitas tunggal yang sama, melainkan adalah kesadaran sebagai bagian dari integralitas bangsa yang menghargai pluralitas dan berbagai perbedaan yang ada untuk hidup bersama.

Dalam menciptakan tertib sosial diperlukan sebuah pengaturan kehidupan masyarakat secara politis melalui kekuasaan dan kewenangan yang diatur dalam sebuah sistem politik. Dasar dari paradigma kekuasaan adalah pada konsepsi tentang manusia yang dalam gerak kehidupannya didorong oleh *the libido dominandi*, yakni motif atau hasrat untuk berkuasa (*the will to power*).

Sistem politik adalah pola hubungan antar manusia yang terjadi secara terus menerus yang melibatkan hal-hal yang luas seperti pengawasan, pengaruh, kekuasaan, aturan-aturan, atau kewenangan.

Sistem komunikasi memiliki banyak makna. Dalam dimensi kemasyarakatan, sistem komunikasi mencakup semua yang terkait dengan gerak kehidupan manusia dengan semua perangkat kehidupannya. Komunikasi merupakan sesuatu yang inheren dalam kehidupan manusia sehingga komunikasi dapat mencakup semua sistem dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah sistem komunikasi yang terdiri dari komunikasi tradisional dan komunikasi modern yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, baik secara filosofis, sosial maupun politik yang pada dasarnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dengan informasi yang mendidik, menghibur dan memiliki fungsi kontrol dalam kehidupan bersama, yang melestarikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa, membangun watak dan kepribadian bangsa, dan menjadi perekat sosial bagi kesatuan dan persatuan bangsa, integrasi nasional, kemajemukan masyarakat, dan mendukung kehidupan ekonomi dan pemerintahan sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat dalam pergaulan antarbangsa.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sistem politik merupakan salah satu subsistem dari sistem....
 - A. budaya
 - B. sosial
 - C. kepribadian
 - D. perilaku Organisme

- 2) Hakikat sistem politik adalah pada politik itu sendiri. Hakikat dari politik adalah pada....
 - A. keberhasilan mencapai tujuan
 - B. kedudukan dan jabatan
 - C. kekuasaan
 - D. membentuk keseimbangan dalam masyarakat

- 3) Pengertian politik menurut Winlesham menekankan pada aspek....
 - A. perjuangan meraih kekuasaan
 - B. kewenangan pengaturan
 - C. pengelolaan institusi politik
 - D. pengaturan masyarakat.

- 4) Pengertian *the libido dominandi* adalah hasrat untuk....
 - A. mendapatkan kekayaan
 - B. dikenal banyak orang
 - C. berkuasa
 - D. hidup senang

- 5) Kekuasaan yang didasarkan pada pengetahuan disebut dengan....
 - A. *dominating power*
 - B. *epistemic power*
 - C. *concertive power*
 - D. *developmental power*

- 6) Pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond menekankan pada aspek....
 - A. pengawasan
 - B. sistem-sistem interaksi masyarakat merdeka
 - C. kekuasaan
 - D. peraturan-peraturan

- 7) Sistem komunikasi dapat memiliki makna sebagai sistem....
- bahasa
 - pola model komunikasi
 - telekomunikasi
 - semua jawaban benar
- 8) Dalam perspektif kultural, komunikasi merupakan sebuah proses simbolik di mana realita....
- diproduksi
 - diciptakan dan diubah
 - dipelihara dan diperbaiki
 - diproduksi, dipelihara, diperbaiki, dan ditransformasikan
- 9) Analogi sistem komunikasi pada sistem kepribadian Talcot Parson adalah sistem komunikasi....
- budaya
 - sosial
 - organisasi
 - intra dan interpersona
- 10) Landasan filosofis dan yuridis sistem komunikasi Indonesia adalah....
- nilai-nilai budaya dasar dalam sistem budaya
 - nilai-nilai sosial dalam sistem sosial
 - Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - peraturan-peraturan pemerintah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

- Arti tingkat penguasaan:
- 90 - 100% = baik sekali
 - 80 - 89% = baik
 - 70 - 79% = cukup
 - < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) D
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) B
- 8) C
- 9) A
- 10) D

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) C
- 5) B
- 6) B
- 7) D
- 8) D
- 9) C
- 10) C

Daftar Pustaka

- Adamsen, Paul B. 2000. *A Complex System Design and Management Framework*. Boca Raton, FL, Florida: CRC Press.
- Astakhov, Viktor P. 1998. *Metal Cutting Mechanics*. Boca Raton, FL, Florida: CRC Press.
- Bruce J. Malina. 2001. *The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology*. (Third Edition, Revised and Expanded). Louisville: Westminster John Knox Press.
- Carey, James W. 1998. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. New York and London: Routledge.
- Gabriele, Almond, et al. 1960. *The Politics of Developing Areas*. New Jersey: Princeton University Press.
- Griffin, Em. 2003. *A First Look At Communication Theory*. 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Griffin, Em. 2003. *A First Look At Communication Theory*. 7th ed. p. 345-349. New York: McGraw-Hill.
- Hall, Arthur D. 1962. *A Methodology for System Engineering*. Princeton, NJ: D. Van Nostrand.
- Irving Fang and Kristina Ross.1996. *Media History: Timeline by Chronology*. www.mediahistory.umn.edu/time/century.htm/
- Jeffrey, Isaac. 2002. Conception of Power. dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan. *Encyclopedia of overnment and Politics*. Volume 1. London and New York: Routledge.
- Jens, Beckert. 2002. *Beyond the Market: the Social Foundations of Economic Efficiency*. Princeton University Press.

- Marry E. Hawkesworth and Maurice Kogan (ed). 2004. *Encyclopedia of Government and Politics*. Volume one. 2 nd edition. New York: Routledge.
- Michael, Tracey. 1977. *The Production of Political Television*. London: Routledge & Kegan Paul, Ltd.
- Paul Bedell. 2005. *Wireless Crash Course*. 2 nd ed. New York: McGraw-Hill Professional.
- Rappaport, T. S. 1996. *Wireless Communications: Principles And Practice*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR.
- Rechtin, Eberhardt and Mark W Maier. 1977. *The Art of Systems Architecting*. Boca Raton, FL, Florida: CRC Press.
- Rechtin, Eberhardt., 1991. *System Architecting: Creating and Building Complex System*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Robert A. Dahl. 1977. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice Hall of India.
- Robert, Litke. 1997. "Domination and Other Kinds of Power" dalam Laurence F. Bove, & Laura Duhan Kaplan. *Philosophical Perspectives on Power and Domination: Theories and Practices*. Amsterdam-Atlanta: Radopi B.V.
- Schwartz, M., Bennett, W. R., & Stein, S. 1996. *Communication systems Systems and techniquesTechniques*. New York: IEEE Press.
- Sistem Politik. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik Communication System.http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_system
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.